



9 772088 235001

EFEKTIVITAS PAKET STIMULUS EKONOMI KUARTAL IV 2025 DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Venti Eka Satya*

Abstrak

Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi kuartal IV tahun 2025 yang merupakan upaya strategis untuk menghadapi tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Artikel ini membahas paket stimulus ekonomi kuartal IV tahun 2025 dan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Paket stimulus bernilai Rp16,23 triliun ini terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang akan dilanjutkan di 2026, serta program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Para ekonom menilai stimulus ini cakupannya lebih luas serta dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan daya beli. Namun, stimulus ini hanya bersifat musiman dan dinilai tidak cukup kuat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2%. Komisi XI DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan program dalam paket stimulus ekonomi agar tepat sasaran dan tidak menambah defisit anggaran. Program subsidi tenaga kerja perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan apakah sudah tepat dilakukan oleh pemerintah atau perlu dialihkan kepada pihak swasta sebagai pemberi kerja.

Pendahuluan

Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian, dalam keterangan persnya mengumumkan kebijakan paket stimulus ekonomi pada pertengahan September 2025. Paket stimulus ekonomi ini merupakan upaya strategis untuk menghadapi tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Paket stimulus ini terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang akan dilanjutkan di 2026, serta program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) jajaran Kabinet Merah Putih, pada 2 Oktober 2025, Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Pemerintah akan memastikan bahwa seluruh program dan anggaran yang ditetapkan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga dengan paket stimulus ini, akan diarahkan secara tepat sasaran (Ibrahim, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: venti.satya@dpr.go.id

Para ekonom menilai bahwa paket stimulus kuartal IV tahun 2025 ini hanya efektif untuk mendorong mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa paket stimulus ini lebih bersifat jangka pendek dan tidak mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai paket stimulus hanya merupakan strategi pemerintah untuk memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru seperti halnya stimulus ekonomi pada kuartal II yang memanfaatkan momentum Lebaran (Simanjuntak, 2025). Artikel ini membahas mengenai paket stimulus ekonomi kuartal IV tahun 2025 dan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Paket Stimulus Ekonomi Kuartal IV Tahun 2025

Kebijakan stimulus fiskal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, stimulus ini juga penting untuk kebijakan *counter cyclical* untuk mengembalikan kestabilan ekonomi yang mengalami resesi (Wardhana & Hartono, 2012). Kebijakan stimulus fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan fiskal yang dilakukan secara ekspansif melalui kebijakan anggaran yang longgar (*loose budget policy*) dan ditujukan untuk mendorong perekonomian (Abimanyu, 2005).

Pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi Kuartal IV Tahun 2025 dengan anggaran senilai Rp16,23 triliun. Paket stimulus ini merupakan yang ketiga diluncurkan oleh Pemerintah pada tahun 2025. Paket stimulus pertama dikeluarkan pada Januari sebesar Rp33 triliun dan stimulus kedua pada Juni sebesar Rp24,4 triliun (Armandhanu, 2025).

Delapan program akselerasi tersebut adalah: (1) Program magang *fresh graduate* perguruan tinggi maksimal satu tahun. Target penerima manfaat sebanyak 20 ribu orang yang diberikan uang saku selama enam bulan. Anggaran yang dipersiapkan untuk program ini adalah Rp198 miliar. (2) Perluasan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). PPh DTP saat ini akan dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya adalah 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp120 miliar. (3) Bantuan pangan. Pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan pada bulan Oktober dan November dengan evaluasi di bulan Desember. Anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp7 triliun. (4) Subsidi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (pengemudi transportasi *online* dan ojek pangkalan). Program ini menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran sebesar 50% selama 6 bulan. (5) Program Perumahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-K), berupa manfaat tambahan dengan menurunkan bunga kredit perumahan bagi pekerja dan pengembang perumahan. (6) Program padat karya tunai yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dengan besar anggaran masing-masing Rp3,5 triliun dan Rp1,8 triliun. (7) Percepatan deregulasi perizinan berusaha dengan alokasi dana sebesar Rp3,5 miliar, penerima manfaat terdiri dari 50 daerah di tahun 2025 dan 300 daerah di tahun 2026. (8) Pemberlakuan program perkotaan dengan meningkatkan kualitas pemukiman dan tempat untuk gig ekonomi (Wahyuni, 2025).



Empat program akan dilanjutkan tahun 2026. *Pertama*, perpanjangan insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dan dipastikan berlaku hingga tahun 2029, sehingga tidak lagi diperpanjang setiap tahun. Pada tahun 2025, alokasi anggaran telah disiapkan sebesar Rp2 triliun bagi 542 ribu wajib pajak terdaftar. *Kedua*, perpanjangan PPh DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Estimasi anggaran sebesar Rp480 miliar dialokasikan untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. *Ketiga*, insentif PPh DTP bagi pekerja industri padat karya, meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit. Insentif ini menargetkan 1,7 juta pekerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp800 miliar yang telah disediakan pada tahun 2025. *Keempat*, memperluas program diskon iuran JKK dan JKM kepada petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga dengan target 9,9 juta penerima manfaat dan anggaran sebesar Rp753 miliar pada tahun 2026 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Adapun lima program andalan untuk mendorong perluasan kesempatan kerja adalah menyiapkan program untuk koperasi desa merah putih, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak di kawasan Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Pemerintah memastikan bahwa program stimulus tersebut tidak akan menambah tekanan defisit anggaran (Simanjuntak, 2025). Menteri Keuangan akan menggeser anggaran kementerian/lembaga yang tidak terserap untuk membiayai program ini. Menurut Menko Perekonomian, serangkaian stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV tahun 2025 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Implementasi program andalan pemerintah tersebut akan dipercepat hingga akhir tahun, karena mampu mendorong konsumsi sebagai penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Efektivitas Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025

Untuk menentukan bentuk kebijakan stimulus fiskal yang akan diberikan, pemerintah harus mengidentifikasi secara cermat dampak masing-masing instrumen stimulus fiskal, agar dapat dipastikan instrumen yang digunakan mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian, serta mampu mencapai sasaran yang dituju. Dampak ekonomi dari setiap pilihan kebijakan stimulus fiskal akan diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu perubahan PDB, kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, dan *output* sektoral (Wardhana & Hartono, 2012).

Maria Monica, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan stimulus ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat, terutama mereka yang ada di perbatasan antara kelas menengah bawah dan kelas ekonomi rentan. Stimulus juga dimaksudkan memberikan pekerjaan sementara bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan tetap di sektor formal. Mochammad Faisal, Executive Director di Core Indonesia, menyatakan bahwa dalam stimulus kali ini pemerintah Indonesia mencoba menuntaskan isu ketimpangan melalui program magang berbayar dan padat karya tunai. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan, daya beli

masyarakat akan meningkat. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economics and Law Studies, mengapresiasi paket stimulus lainnya yang dianggap pro terhadap masyarakat rentan miskin seperti bantuan beras dan subsidi asuransi. Masyarakat rentan miskin kadang tidak mendapatkan insentif yang dapat mendorong daya beli mereka (Armandhanu, 2025).

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. R.Taufikurahman, melihat bahwa desain stimulus ini bernuansa musiman. Diskon tarif transportasi massal diharapkan akan memicu mobilitas masyarakat pada momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Target dari kebijakan ini adalah konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB, sehingga intervensi berbasis transfer dan potongan harga langsung ke konsumen diharapkan memberi dampak cepat pada daya beli. Insentif pariwisata akan menambah belanja hilir pada sektor akomodasi, makanan-minuman, hingga perdagangan, meski dampaknya masih terbatas, karena kontribusi sektor pariwisata hanya 4%-5% terhadap PDB.

Peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy, menilai dampak sejumlah insentif belum tentu signifikan. PPh DTP sangat bergantung pada pemberi kerja sehingga tidak langsung dirasakan pekerja. Konsumsi akhir tahun memang meningkat tetapi, skalanya tidak sebesar momentum Lebaran. Oleh sebab itu, berbagai insentif diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, namun belum bisa menaikkan hingga mencapai target pemerintah sebesar 5,2% pada tahun 2025 (Simanjuntak, 2025).

Para pengamat ekonomi berpendapat bahwa stimulus kali ini cakupannya lebih luas, bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan gestur politik Pemerintah untuk meredam keresahan publik akibat berbagai kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yang dinilai kurang berpihak pada rakyat. Meski anggaran paket stimulus kuartal IV tahun ini adalah yang paling kecil dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi dalam paket kali ini pemerintah mencoba mengatasi ketimpangan dan memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Namun, program ini dinilai hanya bersifat musiman dan tidak cukup kuat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, mengingat waktu yang sempit hingga akhir kuartal serta ada beberapa tantangan yang perlu terlebih dulu diatasi. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut antara lain: menciptaan pekerjaan yang berkualitas, memperbaiki iklim investasi dan usaha untuk menarik investor di sektor padat karya, memperbaiki regulasi dan kepastian hukum, serta mengembalikan atau mempertahankan kepercayaan investor di tengah gejolak politik di Indonesia. Dengan demikian program-program yang dicanangkan akan efektif dalam memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian.

Penutup

Pemerintah kembali mengumumkan paket stimulus untuk kuartal IV tahun 2025. Paket stimulus ini terdiri dari delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program lanjutan di tahun 2026, serta program untuk penyerapan tenaga kerja. Cakupan paket stimulus kali ini lebih luas, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meredam keresahan publik. Meski demikian, program ini dinilai tidak cukup kuat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% karena waktu yang singkat, hanya sampai akhir tahun, dan masih banyak tantangan yang perlu terlebih dahulu diatasi Pemerintah.

DPR RI, terutama Komisi XI, perlu mengawasi pelaksanaan paket stimulus ekonomi ini agar tepat sasaran dan tidak menambah tekanan defisit anggaran. Program terkait bantuan untuk tenaga kerja juga perlu dikaji lebih lanjut apakah sudah tepat dilakukan pemerintah atau perlu dialihkan kepada pihak swasta sebagai pemberi kerja. Hal ini penting untuk memastikan anggaran pemerintah dialokasikan untuk rakyat kecil dan bukan pengusaha yang sudah mapan.

Referensi

- Abimanyu, A. (2005). Kebijakan fiskal dan efektivitas stimulus fiskal di Indonesia: Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE INDORANI. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 1, 1–36.
- Armandhanu, D. (2025, September 17). Stimulus ekonomi terbaru: Paket terkecil di 2025, apakah bisa memenuhi target? CNA.Id: Berita Indonesia, Asia Dan Dunia. <https://www.cna.id>
- Ibrahim, M. (2025, October 2). Pemerintah jamin paket stimulus 8+4+5 tak salah sasaran, berikut rinciannya. *Infobanknews*. <https://infobanknews.com/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025, September 15). *Paket Ekonomi 2025: strategi pemerintah dorong pertumbuhan, tingkatkan investasi, dan ciptakan lapangan kerja - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6558/>
- Simanjuntak, S. D. A. (2025, October 2). *Ekonom: Bobot stimulus ekonomi kecil, hanya jaga persepsi pertumbuhan*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251002/9/>
- Wahyuni, W. (2025, September 17). Apa Itu kebijakan stimulus ekonomi 8+4+5? ini penjelasan dan daftar programnya. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/>
- Wardhana, W., & Hartono, D. (2012). Instrumen stimulus fiskal: Pilihan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 107–115. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.492>

